



## **Pembangunan Pertanian Pedesaan Di Lombok Utara: Institusi, Tata Kelola, Dan Pemberdayaan Petani**

**Siti Zainab\*, Hayati**

*Doktor Pertanian Berkelanjutan Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, Indonesia*

### **Kata Kunci**

**Kata kunci:** pembangunan pertanian, lahan kering, pemberdayaan petani, kelembagaan lokal, usahatani berkelanjutan

### **Keywords**

**Keywords:** agricultural development, dryland farming, farmer empowerment, local institutions, sustainable agriculture

### **Abstrak**

Pembangunan pertanian di wilayah lahan kering dan kepulauan menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan akses pasar, sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang adaptif, berbasis kelembagaan, dan berorientasi pada pemberdayaan petani. Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik agroekologi lahan kering yang sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pembangunan pertanian pedesaan di Lombok Utara melalui pendekatan studi literatur dengan fokus pada pemberdayaan petani, sistem usahatani, serta peran institusi dan tata kelola lokal. Metode yang digunakan adalah studi literatur naratif-kritis terhadap artikel ilmiah dan laporan kebijakan periode 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa program pembangunan pertanian di wilayah tersebut masih didominasi pendekatan berbasis proyek seperti pelatihan, demplot, dan pendampingan teknis yang mampu meningkatkan kapasitas petani dalam jangka pendek. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kelembagaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan lokal serta transformasi kebijakan menuju model pembangunan pertanian yang lebih sistemik, partisipatif, dan berkelanjutan.

### **Abstract**

Agricultural development in dryland and archipelagic regions faces structural constraints such as limited natural resources, weak infrastructure, and restricted market access. These conditions require adaptive policy approaches that are institution-based and oriented toward farmer empowerment. North Lombok Regency represents a typical dryland agroecological area where agriculture remains the primary livelihood for rural communities. This study aims to review recent literature on the dynamics of rural agricultural development in North Lombok, with a focus on farmer empowerment, farming systems, and the role of local institutions and governance. A critical narrative literature review was conducted on scientific articles and policy reports published between 2020 and 2025. The findings indicate that agricultural development programs in the region are still predominantly project-based, including training activities, demonstration plots, and technical assistance. These interventions have improved farmer capacity in the short term but have not been fully institutionalized within a sustainable regional development governance system. Therefore, strengthening local institutions and transforming development approaches toward a more systemic, participatory, and sustainable agricultural model is essential.

\*Corresponding Author: **Siti Zainab**, Doktor Pertanian Berkelanjutan Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

Email: [Sitizainab83@gmail.com](mailto:Sitizainab83@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v12i1.1022>

History Artikel: Received: 2 Januari 2026 | Accepted: 29 Maret 2026

## PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian pedesaan merupakan pilar strategis dalam pembangunan wilayah, khususnya di daerah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor pertanian pedesaan tidak hanya diposisikan sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga sebagai penopang utama perekonomian masyarakat, sumber lapangan kerja, serta penyangga stabilitas sosial di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian pedesaan memiliki peran multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan. Di wilayah lahan kering dan kepulauan seperti Kabupaten Lombok Utara, peran sektor pertanian menjadi semakin strategis karena keterbatasan pilihan mata pencaharian alternatif di luar sektor primer. Kondisi agroekologi yang didominasi oleh lahan kering, curah hujan yang tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur produksi dan pemasaran menjadikan pertanian sebagai sektor yang rentan terhadap risiko iklim dan pasar. Dalam situasi tersebut, pertanian tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga, tetapi juga sebagai basis ketahanan pangan dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan.

Pembangunan pertanian pedesaan di wilayah seperti Lombok Utara idealnya tidak diarahkan semata-mata pada peningkatan produksi komoditas pertanian. Orientasi yang terlalu menekankan aspek produksi berpotensi mengabaikan persoalan struktural yang dihadapi petani, seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, lemahnya posisi tawar dalam rantai nilai, serta rendahnya kapasitas kelembagaan petani. Oleh karena itu, pembangunan pertanian pedesaan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas petani sebagai pelaku utama pembangunan, pengembangan kelembagaan lokal, serta perbaikan tata kelola kebijakan yang mampu menjamin keberlanjutan sistem pertanian. Hasil review pustaka menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian pedesaan sangat ditentukan oleh keterpaduan antara inovasi teknis, dukungan kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat (Lestari, 2024; Hajarani & Imsar, 2025).

Inovasi teknis seperti pengembangan varietas adaptif, diversifikasi usahatani, dan penerapan teknologi ramah lingkungan hanya akan memberikan dampak optimal apabila didukung oleh kelembagaan petani yang kuat dan sistem kebijakan yang kondusif. Partisipasi masyarakat, khususnya petani, menjadi prasyarat penting agar inovasi yang diperkenalkan sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat diadopsi secara berkelanjutan, namun berbagai studi juga menunjukkan bahwa intervensi pembangunan pertanian di tingkat lokal masih didominasi oleh

pendekatan proyek-sentris dan berjangka pendek. Program-program pemberdayaan petani umumnya dilaksanakan dalam kerangka waktu terbatas, dengan fokus pada pencapaian output jangka pendek seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis, atau produksi. Pendekatan ini relatif efektif dalam meningkatkan kapasitas petani pada tahap awal, namun dampaknya sering kali tidak berlanjut setelah program berakhir. Kondisi ini berpotensi menghasilkan peningkatan kapasitas yang bersifat sementara tanpa menjamin keberlanjutan ekonomi dan kelembagaan petani.

Kabupaten Lombok Utara memberikan gambaran empiris yang relevan mengenai dinamika pembangunan pertanian pedesaan tersebut. Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam lima tahun terakhir menunjukkan berkembangnya beragam model pemberdayaan petani. Model-model tersebut meliputi pengembangan hortikultura lahan kering berbasis diversifikasi komoditas, usahatani terpadu tanaman-ternak, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, serta penguatan kelompok tani dan lembaga agribisnis lokal. Intervensi-intervensi ini pada umumnya dirancang untuk meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, dan mendorong adopsi praktik pertanian berkelanjutan. Pengembangan hortikultura lahan kering, misalnya, dipandang sebagai strategi adaptif untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani di tengah keterbatasan sumber daya air. Sementara itu, usahatani terpadu tanaman-ternak menawarkan pendekatan yang lebih holistik melalui integrasi berbagai subsektor pertanian guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi risiko usaha.

Optimalisasi pekarangan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus memperkuat ketahanan pangan pada tingkat mikro. Di sisi lain, penguatan kelompok tani dan kelembagaan agribisnis lokal berperan penting dalam meningkatkan akses petani terhadap input produksi, informasi, dan pasar, meskipun berbagai pendekatan tersebut menunjukkan dampak positif, hasil review Pustaka juga menunjukkan bahwa keberlanjutan hasil pembangunan masih menghadapi tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya proses institusionalisasi program ke dalam sistem tata kelola pertanian daerah. Banyak inisiatif pemberdayaan petani yang bergantung pada dukungan eksternal, baik dari perguruan tinggi maupun program pemerintah, tanpa diikuti dengan penguatan peran pemerintah daerah dan kelembagaan lokal secara berkelanjutan. Akibatnya, ketika pendampingan berakhir, kapasitas kelembagaan petani sering kali melemah dan kegiatan usaha sulit untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam pembangunan pertanian

pedesaan masih relatif terbatas.

Pembangunan pertanian sering kali berjalan terpisah dari kebijakan pembangunan infrastruktur, pengembangan pasar, dan penguatan ekonomi pedesaan secara umum. Kondisi tersebut menyebabkan hasil pembangunan pertanian tidak sepenuhnya terintegrasi dalam strategi pembangunan wilayah yang lebih luas. Keberlanjutan pertanian pedesaan sangat bergantung pada dukungan sektor lain, seperti infrastruktur jalan, sistem pemasaran, akses pembiayaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini bertujuan untuk mereview secara kritis pembangunan pertanian pedesaan di Kabupaten Lombok Utara dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) mengkaji berbagai model pemberdayaan petani dan sistem usahatani yang dikembangkan dalam konteks lahan kering, (2) menganalisis peran kelembagaan lokal dan pemerintahan dalam mendukung pembangunan pertanian pedesaan, (3) mengkaji implikasi pendekatan pembangunan yang digunakan terhadap keberlanjutan sistem pertanian pedesaan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan arah pengembangan pembangunan pertanian pedesaan yang berkelanjutan di wilayah lahan kering seperti Lombok Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode naratif-kritis untuk mereview dinamika pembangunan pertanian pedesaan di Kabupaten Lombok Utara. Pendekatan studi literatur dipilih karena tujuan utama studi ini adalah untuk mensintesis, mengkaji, dan menginterpretasikan temuan-temuan ilmiah yang telah dipublikasikan terkait pemberdayaan petani, pengembangan usahatani, serta peran kelembagaan dan tata kelola pertanian pedesaan. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola umum, kecenderungan pendekatan, serta kesenjangan konseptual dan praktis dalam pembangunan pertanian pedesaan. Sumber data penelitian berupa artikel jurnal ilmiah nasional yang terbit pada periode 2020–2025. Pemilihan rentang waktu tersebut dimaksudkan untuk menangkap perkembangan terbaru kebijakan, pendekatan pemberdayaan, dan inovasi pertanian pedesaan, khususnya di wilayah lahan kering dan kepulauan. Literatur yang dikaji mencakup hasil penelitian, artikel konseptual, serta laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tema pembangunan pertanian pedesaan di Lombok Utara dan wilayah sekitarnya.

Proses pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran pada portal jurnal nasional terakreditasi, repositori perguruan tinggi, serta laman

jurnal pengabdian dan penelitian yang banyak mempublikasikan studi tentang pertanian lahan kering. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi pembangunan pertanian pedesaan, pemberdayaan petani, pertanian lahan kering, kelembagaan petani, usahatani terpadu, dan Lombok Utara. Literatur yang diperoleh selanjutnya diseleksi berdasarkan relevansi topik, tahun publikasi, serta kesesuaian konteks wilayah dan substansi kajian. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah klasifikasi literatur berdasarkan fokus kajian, yaitu: (1) model pemberdayaan petani, (2) sistem dan pola usahatani pedesaan, (3) peran kelembagaan lokal dan pemerintahan, serta (4) pendekatan kebijakan dan keberlanjutan pembangunan pertanian. Tahap kedua adalah analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tujuan, metode, temuan utama, serta rekomendasi dari masing-masing artikel. Tahap ketiga adalah sintesis tematik, yaitu mengaitkan temuan-temuan tersebut dalam kerangka analisis yang lebih luas untuk melihat pola, kecenderungan, serta keterbatasan pembangunan pertanian pedesaan di Lombok Utara. Pendekatan naratif-kritis digunakan untuk menilai secara reflektif efektivitas berbagai intervensi pembangunan pertanian pedesaan. Analisis tidak hanya difokuskan pada capaian positif, tetapi juga pada keterbatasan dan tantangan yang dihadapi, khususnya terkait keberlanjutan kelembagaan dan integrasi kebijakan. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pembangunan pertanian pedesaan sekaligus menjadi dasar perumusan implikasi kebijakan dan rekomendasi strategis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Model Pemberdayaan Petani dan Usahatani Pedesaan**

Model pemberdayaan petani dan pengembangan usahatani pedesaan di Lombok Utara sangat dipengaruhi oleh karakteristik agroekologi lahan kering, keterbatasan sumber daya air, serta struktur sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Literatur menunjukkan bahwa sebagian besar program pemberdayaan petani diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan, diversifikasi sumber pendapatan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya lokal melalui berbagai inovasi usahatani. Pengembangan hortikultura lahan kering merupakan salah satu model pemberdayaan yang paling dominan diterapkan. Diversifikasi komoditas hortikultura, seperti sayuran dan tanaman semusim bernilai ekonomi tinggi, dipandang sebagai strategi adaptif untuk meningkatkan pendapatan petani di tengah keterbatasan lahan dan air. Penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan dan Good Agricultural Practices terbukti meningkatkan

produktivitas dan kualitas.

### **Peran Kelembagaan Lokal dan Pemerintahan.**

Kelembagaan lokal memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan pertanian pedesaan di Lombok Utara. Kelompok tani menjadi aktor utama dalam implementasi berbagai program pemberdayaan petani, baik sebagai wadah pembelajaran, organisasi produksi, maupun sarana koordinasi antarpetani. Melalui kelompok tani, petani memperoleh akses terhadap informasi teknologi, input produksi, serta berbagai bentuk pendampingan teknis. Lembaga Pengembangan Agribisnis Hortikultura (LPAH) juga berperan penting dalam mendukung pengembangan usaha tani hortikultura. Lembaga ini berfungsi sebagai simpul pengembangan pembibitan, distribusi input, serta penguatan kemitraan usaha antara petani dan pihak eksternal (Muktasam et al., 2022). Namun demikian, keberlanjutan peran LPAH masih menghadapi keterbatasan, terutama terkait kapasitas manajerial dan ketergantungan terhadap dukungan proyek.

Pemerintah daerah dan dinas teknis memiliki peran sebagai fasilitator dan regulator dalam pembangunan pertanian pedesaan. Berbagai program pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan teknis dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan kelompok tani. Kegiatan seperti pelatihan pengolahan kompos, pembuatan pestisida nabati, dan pengelolaan limbah pertanian merupakan contoh peran pemerintah dalam mendorong praktik pertanian ramah lingkungan (Syafitri et al., 2021; Permatasari et al., 2020; Jayaputra et al., 2025). Hasil review pustaka menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian pedesaan masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem tata kelola yang komprehensif. Koordinasi lintas sektor, seperti antara pertanian, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi pedesaan, masih relatif terbatas. Kondisi ini menghambat upaya institusionalisasi program pemberdayaan petani dan mengurangi keberlanjutan dampak pembangunan.

### **Peran Kelembagaan Lokal dan Pemerintahan**

Kelembagaan lokal seperti kelompok tani dan Lembaga Pengembangan Agribisnis Hortikultura (LPAH) memainkan peran strategis dalam pembangunan pertanian pedesaan, khususnya sebagai simpul distribusi input produksi, penyediaan pembibitan, serta penghubung kemitraan usaha antara petani dan aktor pasar. Dalam konteks wilayah pedesaan berbasis hortikultura, kelembagaan ini berfungsi sebagai wahana kolektif yang memungkinkan petani kecil mengakses sumber daya produktif yang secara individual sulit dijangkau,

seperti benih unggul, sarana produksi pertanian, informasi pasar, dan jaringan pembiayaan. Muktasam et al. (2022) menunjukkan bahwa keberadaan kelompok tani dan LPAH mampu meningkatkan efisiensi distribusi input dan memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai agribisnis, terutama ketika kelembagaan tersebut difasilitasi oleh intervensi program pemerintah atau dukungan lembaga eksternal. Peran kelembagaan lokal tersebut masih menunjukkan karakter yang rapuh dan sangat bergantung pada proyek-proyek pembangunan jangka pendek serta pendampingan eksternal. Ketergantungan ini mencerminkan lemahnya proses institusionalisasi kelembagaan lokal dalam sistem tata kelola pertanian daerah. Dalam banyak kasus, kelompok tani dan LPAH aktif dan berfungsi optimal hanya selama siklus proyek berlangsung, sementara setelah dukungan program berakhir, aktivitas kelembagaan cenderung melemah atau bahkan berhenti sama sekali. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penguatan kelembagaan lokal belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang, melainkan masih didominasi oleh pendekatan berbasis proyek (*project-based approach*) yang bersifat *top-down*.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari paradigma pembangunan pertanian yang selama ini lebih menekankan pada pencapaian output fisik dan target kuantitatif, seperti peningkatan luas tanam, produksi, atau jumlah kelompok tani binaan, dibandingkan dengan penguatan kapasitas kelembagaan secara struktural. Akibatnya, kelompok tani sering kali diposisikan sebagai instrumen administratif untuk penyaluran bantuan dan pelaksanaan program, bukan sebagai entitas sosial-ekonomi yang otonom dan berdaya. Hal ini sejalan dengan temuan Syafitri et al. (2021) yang menegaskan bahwa banyak kelompok tani di tingkat lokal belum berkembang menjadi organisasi ekonomi petani yang mandiri, melainkan masih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi kebijakan sektoral. Lebih lanjut, LPAH yang dirancang sebagai lembaga penggerak agribisnis hortikultura di tingkat lokal menghadapi tantangan serupa. Meskipun secara konseptual LPAH memiliki mandat untuk mengintegrasikan aspek produksi, pengolahan, pemasaran, dan kemitraan usaha, dalam praktiknya kapasitas kelembagaan ini sering kali terbatas oleh sumber daya manusia yang minim, kelemahan tata kelola internal, serta ketergantungan pada fasilitator eksternal. Permatasari et al. (2020) mencatat bahwa banyak LPAH belum mampu menjalankan fungsi bisnis secara berkelanjutan karena belum adanya skema insentif ekonomi yang jelas dan dukungan kebijakan daerah yang konsisten.

Peran pemerintah daerah dan dinas teknis pertanian dalam konteks ini umumnya hadir dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, dan fasilitasi program.

Kegiatan tersebut penting sebagai upaya peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan lokal, terutama dalam aspek teknis budidaya, manajemen usaha tani, dan adopsi inovasi pertanian. Namun, intervensi tersebut sering kali bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka tata kelola pertanian daerah yang holistik dan berkelanjutan. Jayaputra et al. (2025) menegaskan bahwa fragmentasi program dan lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penguatan kelembagaan pertanian di tingkat lokal. Dalam banyak daerah, kebijakan pembangunan pertanian masih berjalan secara sektoral dan terpisah antara aspek produksi, pemasaran, kelembagaan, dan pembiayaan. Dinas pertanian lebih fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas, sementara aspek pengembangan pasar dan kelembagaan ekonomi petani kurang mendapat perhatian yang memadai. Akibatnya, kelompok tani dan LPAH tidak terintegrasi secara sistemik dalam perencanaan pembangunan daerah, melainkan hanya menjadi objek program tahunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas tata kelola pertanian berbasis kelembagaan dan realitas implementasi di tingkat daerah.

Selain itu, lemahnya integrasi kelembagaan lokal dalam tata kelola pertanian daerah juga dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi dan kebijakan pendukung. Banyak daerah belum memiliki peraturan daerah atau kebijakan strategis yang secara eksplisit mengatur peran, fungsi, dan penguatan kelembagaan petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas, kelompok tani dan LPAH sulit berkembang menjadi institusi yang memiliki legitimasi kuat, baik secara sosial maupun ekonomi. Hal ini memperkuat ketergantungan kelembagaan lokal pada dukungan proyek dan memperlemah daya tahan institusi dalam menghadapi dinamika pasar dan perubahan kebijakan. Dari perspektif tata kelola (*governance*), kondisi tersebut mencerminkan masih dominannya pendekatan *government-driven* dibandingkan *governance-driven* dalam pembangunan pertanian daerah. Kelembagaan lokal belum sepenuhnya dilibatkan sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, melainkan lebih sering diperlakukan sebagai penerima manfaat program. Padahal, berbagai literatur menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kuatnya kelembagaan lokal yang mampu mengelola sumber daya secara kolektif, adaptif, dan inovatif. Tanpa penguatan kelembagaan yang berkelanjutan, intervensi teknis dan bantuan fisik cenderung menghasilkan dampak jangka pendek yang tidak bertransformasi menjadi perubahan struktural.

Lebih jauh, ketergantungan pada

pendampingan eksternal juga menimbulkan persoalan terkait transfer pengetahuan dan kepemilikan program (*ownership*). Dalam banyak kasus, pengetahuan dan inovasi yang diperkenalkan melalui proyek tidak sepenuhnya terinternalisasi oleh kelembagaan lokal, sehingga keberlanjutan praktik inovatif menjadi rendah setelah pendampingan berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan kelembagaan belum berjalan secara optimal, karena masih berorientasi pada penyampaian teknologi (*technology transfer*) dibandingkan dengan penguatan kapasitas belajar dan pengambilan keputusan kolektif. Dengan demikian, tantangan utama pengembangan kelembagaan lokal seperti kelompok tani dan LPAH bukan hanya pada aspek ketersediaan program dan pendampingan, tetapi pada bagaimana kelembagaan tersebut diintegrasikan secara sistemik dalam tata kelola pertanian daerah yang berkelanjutan. Diperlukan perubahan paradigma dari pendekatan proyek menuju pendekatan institusional yang menempatkan kelembagaan lokal sebagai aktor kunci pembangunan. Pemerintah daerah perlu memainkan peran sebagai orkestrator tata kelola, yang tidak hanya menyediakan pelatihan dan bantuan, tetapi juga membangun regulasi, insentif, dan mekanisme koordinasi yang memungkinkan kelembagaan lokal berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan lokal harus diarahkan pada peningkatan kapasitas organisasi, transparansi tata kelola internal, keberlanjutan usaha ekonomi, serta jejaring kemitraan yang adil dengan sektor swasta dan lembaga keuangan. Integrasi kelembagaan lokal ke dalam perencanaan pembangunan daerah, seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan sektor pertanian, menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan peran kelompok tani dan LPAH. Tanpa upaya tersebut, kelembagaan lokal akan terus berada dalam siklus ketergantungan proyek dan sulit bertransformasi menjadi pilar utama pembangunan pertanian pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Pendekatan Pemberdayaan dan Tantangan Keberlanjutan**

Pendekatan pemberdayaan petani yang diterapkan dalam pembangunan pertanian pedesaan di Lombok Utara pada umumnya mengadopsi paradigma partisipatif, yang menempatkan petani sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Pendekatan ini tercermin dalam penggunaan berbagai instrumen seperti penyuluhan pertanian, pelatihan teknis, demonstrasi plot (*demplot*), serta metode pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) yang menekankan pada pengalaman, refleksi, dan praktik langsung. Melalui pendekatan tersebut, petani tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dilibatkan secara aktif

dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan usaha tani mereka (Jaya et al., 2021; Mandalika et al., 2023). Keterlibatan aktif ini dianggap mampu meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap inovasi dan program yang diperkenalkan, sehingga mendorong adopsi teknologi yang lebih cepat dan kontekstual. Hasil review pustaka menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif relatif efektif dalam meningkatkan adopsi awal teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan, khususnya pada tahap pengenalan inovasi. Petani yang terlibat dalam proses belajar partisipatif cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, karena teknologi dan praktik yang diperkenalkan disesuaikan dengan kondisi agroekologis dan sosial ekonomi setempat. Di Lombok Utara, pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan pengetahuan petani mengenai teknik budidaya adaptif di lahan kering, pengelolaan air, serta penggunaan input yang lebih efisien. Namun demikian, keberhasilan pada tahap adopsi awal belum sepenuhnya diikuti oleh keberlanjutan dampak pemberdayaan dalam jangka menengah dan panjang.

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam literatur adalah tingginya ketergantungan petani dan kelembagaan lokal terhadap pendampingan eksternal. Banyak program pemberdayaan dirancang dan diimplementasikan dalam kerangka waktu proyek yang terbatas, dengan intensitas pendampingan yang tinggi selama program berlangsung, tetapi tanpa disertai strategi keluar (exit strategy) yang jelas dan terencana. Akibatnya, setelah program berakhir dan pendampingan dihentikan, kapasitas petani dan kelembagaan lokal sering kali mengalami penurunan. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian, melainkan masih menciptakan ketergantungan baru terhadap aktor eksternal, seperti penyuluh, fasilitator proyek, atau lembaga donor. Ketiadaan exit strategy juga mencerminkan lemahnya orientasi jangka panjang dalam perencanaan program pemberdayaan. Banyak intervensi lebih menekankan pada pencapaian output jangka pendek, seperti jumlah petani terlatih atau luas demplot yang dibangun, dibandingkan dengan pembentukan kapasitas adaptif petani dan kelembagaan lokal. Padahal, pemberdayaan sejati menuntut proses pembelajaran berkelanjutan yang memungkinkan petani dan organisasi lokal untuk terus berinovasi dan beradaptasi secara mandiri terhadap perubahan lingkungan dan pasar. Tanpa mekanisme kelembagaan yang kuat, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui program pemberdayaan berisiko tidak terinternalisasi secara permanen.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses petani terhadap modal dan pasar. Meskipun pendekatan partisipatif berhasil

meningkatkan adopsi teknologi dan produktivitas, banyak petani masih menghadapi hambatan struktural dalam mengembangkan usaha tani secara berkelanjutan. Akses terhadap pembiayaan formal, seperti kredit perbankan atau lembaga keuangan mikro, sering kali terbatas akibat persyaratan administratif yang tidak sesuai dengan kondisi petani kecil. Di sisi lain, jaringan pemasaran yang lemah menyebabkan petani sulit memperoleh harga yang layak dan stabil, sehingga peningkatan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan petani tidak dapat direduksi hanya pada aspek teknis budidaya, tetapi harus mencakup penguatan aspek ekonomi dan kelembagaan. Tanpa dukungan sistem pembiayaan yang inklusif dan akses pasar yang adil, petani cenderung kembali pada praktik lama yang dianggap lebih aman, meskipun kurang produktif atau berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan perlu diintegrasikan dengan strategi pengembangan agribisnis pedesaan, termasuk penguatan kelembagaan ekonomi petani, kemitraan usaha, dan pengembangan rantai nilai yang berpihak pada petani kecil.

Selain tantangan struktural tersebut, dinamika perubahan iklim dan ketidakpastian pasar semakin menambah kompleksitas pembangunan pertanian pedesaan di Lombok Utara. Wilayah ini didominasi oleh lahan kering yang sangat rentan terhadap variabilitas iklim, seperti perubahan pola curah hujan dan peningkatan frekuensi kekeringan. Petani lahan kering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap risiko produksi dan pendapatan, sehingga memerlukan dukungan kebijakan adaptif yang lebih kuat. Pendekatan pemberdayaan yang hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu petani tanpa memperhatikan sistem perlindungan risiko dan adaptasi iklim berpotensi tidak efektif dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan lokal menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan petani terhadap perubahan iklim dan ketidakpastian pasar. Kelembagaan yang kuat dapat berfungsi sebagai wadah kolektif untuk berbagi risiko, mengakses informasi iklim, serta mengelola sumber daya secara adaptif. Namun, tanpa integrasi kebijakan yang memadai dan dukungan lintas sektor, peran kelembagaan lokal sering kali belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas pendekatan pemberdayaan yang holistik dan praktik implementasi yang masih terfragmentasi.

Secara keseluruhan, pendekatan pemberdayaan petani di Lombok Utara perlu ditransformasikan dari pendekatan yang bersifat proyek-sentris menuju pendekatan tata kelola pembangunan pertanian pedesaan yang berkelanjutan. Transformasi ini menuntut perubahan paradigma, di mana

pemberdayaan tidak lagi dipahami sebagai serangkaian kegiatan temporer, tetapi sebagai proses institusional jangka panjang yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam membangun kerangka kebijakan yang mendukung keberlanjutan pemberdayaan, termasuk melalui regulasi, insentif, dan mekanisme koordinasi lintas sektor. Penguatan institusi lokal, seperti kelompok tani dan lembaga ekonomi petani, menjadi prasyarat utama dalam transformasi tersebut. Institusi lokal yang kuat dan otonom memungkinkan petani untuk mengelola pengetahuan, sumber daya, dan jaringan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, sinergi lintas sektor—antara pertanian, keuangan, perdagangan, dan lingkungan—perlu diperkuat untuk menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologis pembangunan pertanian pedesaan. Tanpa sinergi tersebut, upaya pemberdayaan petani berisiko tetap terjebak dalam siklus proyek jangka pendek yang tidak mampu menghasilkan perubahan struktural yang signifikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur mengenai pembangunan pertanian pedesaan di Kabupaten Lombok Utara, dapat disimpulkan bahwa berbagai program pemberdayaan petani telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas petani dan pengembangan sistem usahatani lahan kering. Intervensi seperti pelatihan, demonstrasi plot, pendampingan teknis, serta penguatan kelembagaan lokal terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas petani dalam jangka pendek. Selain itu, muncul berbagai model usahatani adaptif seperti hortikultura lahan kering, usahatani terpadu tanaman-ternak, serta optimalisasi pekarangan yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan rumah tangga petani.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa keberlanjutan dampak pembangunan tersebut masih menghadapi kendala struktural, terutama terkait lemahnya institusionalisasi program ke dalam sistem tata kelola pembangunan daerah. Pendekatan pembangunan yang masih didominasi oleh model proyek jangka pendek menyebabkan kelembagaan petani seperti kelompok tani dan LPAH belum berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Ketergantungan terhadap pendampingan eksternal, keterbatasan koordinasi lintas sektor, serta belum terintegrasinya kebijakan pertanian dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi faktor utama yang menghambat transformasi menuju

sistem pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan lokal, integrasi kebijakan lintas sektor, serta perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan proyek-sentris menuju tata kelola pertanian yang lebih sistemik, partisipatif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, I., Utami, S., Primawati, S., Jannah, H., & Sumarjan, S. (2022). Optimalisasi pendayagunaan pekarangan untuk mewujudkan ketahanan pangan petani lahan kering. *Nuras: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Jaya, I., Santoso, B., & Jayaputra, J. (2021). Pengenalan teknologi pertanian berkelanjutan kepada petani lahan kering. *Jurnal Gema Ngabdi*.
- Jayaputra, J., Jaya, I., & Santoso, B. (2021). Peningkatan pendapatan petani melalui diversifikasi hortikultura lahan kering. *Jurnal Gema Ngabdi*.
- Jayaputra, J., Jaya, I., & Santoso, B. (2022). Pengembangan hortikultura lahan kering dan teknologi ramah lingkungan. *Jurnal Gema Ngabdi*.
- Jayaputra, J., Santoso, B., & Jaya, I. (2025). Pelatihan pengolahan kotoran hewan menjadi kompos. *Jurnal Gema Ngabdi*.
- Muktasam, M., Sahidu, A., & Hayati, H. (2022). Penguatan kapasitas kelompok tani hortikultura. *Jurnal Gema Ngabdi*.
- Permatasari, D., et al. (2020). Pelatihan pengolahan limbah pertanian dan peternakan. *Jurnal Gema Ngabdi*.
- Syafitri, A., et al. (2021). Pembuatan pestisida nabati menuju pertanian organik. *Lambung Inovasi*.
- Usahatani, A., et al. (2024). Analisis usahatani lahan kering melalui integrasi tanaman dan ternak. *Agroinovasi*.
- Yusuf, M., et al. (2022). Pemberdayaan ekonomi petani lahan kering berbasis ternak sapi Bali. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*.